

IMPLEMENTASI PROGRAM *OUTREACH* PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Eko Setia Sakti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, eko.23323@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Program Outreach dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka ATS di wilayah tersebut, yang mencapai 2.858 anak dari total 20.555 anak di seluruh Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pelaksanaan program outreach yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan pelibatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program outreach mencakup empat komponen utama menurut teori implementasi George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan adanya tantangan dalam komunikasi program ke masyarakat, keterbatasan SDM, belum adanya SK Satgas ATS, serta perlunya peningkatan koordinasi antar pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meski demikian, program ini dinilai memberikan dampak positif dalam menurunkan angka ATS dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat struktur organisasi pelaksana, memperjelas SOP pelaksanaan, serta meningkatkan dukungan sumber daya untuk efektivitas program outreach di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Outreach, Anak Tidak Sekolah, Pendidikan Kesetaraan, Kecamatan Semampir.

Abstract

This research discusses the implementation of the Outreach Program in addressing Out-of-School Children (ATS) through equivalency education in Semampir District, Surabaya City. The background of this study is based on the high number of ATS in the area, reaching 2,858 children out of a total of 20,555 children across Surabaya City. The purpose of this research is to provide an in-depth description of how the outreach program initiated by the Surabaya City Government is implemented, particularly through the Education Office and the involvement of Community Learning Centers (PKBM). The method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of the outreach program involves four main components based on George C. Edwards III's policy implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate challenges in communicating the program to the community, limited human resources, the absence of a formal ATS Task Force decree, and the need for improved coordination among implementers at the sub-district and district levels. Nevertheless, the program has been considered to have a positive impact on reducing the number of ATS and increasing community awareness of the importance of education. This study recommends that the government strengthen the implementing organizational structure, clarify the standard operating procedures (SOP) for implementation, and enhance resource support to improve the effectiveness of the outreach program in the future.

Keywords: Policy Implementation, Outreach Program, Children Not in School, Equivalency Education, Semampir District.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang esensial dan diakui secara global, termasuk oleh United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), yang menyatakan bahwa pendidikan berperan dalam pengembangan pribadi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sebagai sarana untuk membentuk individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang bebas dan toleran (UNICEF, 2007). Dalam konteks Indonesia, pentingnya pendidikan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup (Hayes, 2018). Penegasan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pelaksanaan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan guna menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara (R. Indonesia, 2003).

Namun, meskipun pendidikan telah diakui sebagai hak dasar dan menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan potensi manusia, kenyataannya masih banyak anak-anak di dunia yang belum mendapatkan akses pendidikan (Sugiyono, 2018). Data dari UNESCO menunjukkan bahwa sekitar 263 juta anak tidak bersekolah, yang terdiri atas 61 juta anak usia sekolah dasar, 60 juta anak usia sekolah menengah pertama, dan 142 juta anak usia sekolah menengah atas (McGinnis, 2016). Fakta ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh dunia, sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap pendidikan sebagai hak asasi manusia masih harus terus diperjuangkan dan diimplementasikan secara nyata (Alamsyah, 2016). Berikut ini adalah daftar 20 negara dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi, berusia antara 4 hingga 19 tahun (Alamsyah, 2016).

Tabel 1. Daftar 20 Negara dengan Jumlah Anak Putus Sekolah Tertinggi

Nama Negara	Di Luar Sekolah	Pria	Perempuan
Somalia	71.5	69.0	74.5
Sudan Selatan	67.0	64.0	71.0
Nigeria	60.0	56.0	63.5
Burka Fasco	52.5	51.0	53.0
Mali	50.0	47.0	53.5
Afganistan	49.0	39.0	60.5
Suriah	47.5	47.0	47.5
Chad	46.5	41.0	53.0
Guinea	43.0	36.0	50.0
Sengal	39.0	39.5	38.0
Republik Demokratik Rakyat Liberia	38.5	39.5	38.0
Gambia	36.0	37.0	36.0
Republik Ceko	35.0	29.0	40.5
Etiopia	34.0	36.0	31.5

Nama Negara	Di Luar Sekolah	Pria	Perempuan
Pakistan	32.5	28.5	37.0
Guinea Bissau	32.5	29.5	35.5
Perwakilan Rakyat Tanaiza	32.5	31.5	34.0
Indonesia	29.5	27.5	32.0
Benin	29.5	26.5	33.0
Republik Afrika Tengah	28.5	20.0	37.0

Sumber UNICEF (2022)

Lebih spesifik lagi, kondisi kasus anak putus sekolah di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan sebanyak 3.094.063 anak Indonesia yang tidak sekolah sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 (data Mei 2024) (Puspitasari, Hendrati, and Wardaya, 2024). Data BPS menunjukkan semakin tinggi kelompok usia, persentase anak tidak sekolah juga ikut tinggi (Kingdon, 1984). Perincian anak tidak sekolah pada tiap jenjang, yaitu tingkat SD sebanyak 161.441 anak, tingkat SMP sebanyak 688.311 anak, dan SMA sebanyak 2.244.311 anak (González, 2017).

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin					
	SD / Sederajat		SMP / Sederajat		SMA / Sederajat	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Laki-laki	0,80	0,68	7,77	7,97	24,56	23,78
Perempuan	0,62	0,66	6,06	5,86	20,35	19,34
Laki-laki + Perempuan	0,71	0,67	6,94	6,93	22,52	21,61

Gambar 1. Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2022-2023
 Sumber: bps.go.id (2024)

Sebagai upaya mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program intervensi bernama Program Bina Warga Belajar (outreach) (Iswahyudi, 2020). Program ini memiliki dasar hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM (Islamy, 2016). Sasaran program ini adalah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), yang difasilitasi oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Fanani, 2019). Pelaksanaan program ini juga merupakan wujud nyata komitmen terhadap amanat wajib belajar 12 tahun, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yang bertujuan untuk memperluas dan memeratakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara usia hingga 21 tahun (Meter and Vanhorn, 1975).

Dalam pelaksanaannya, peserta program outreach memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya (Tilaar and Nugroho, 2008). Melalui kebijakan ini, anak-anak yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali mendapatkan kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan dalam sistem pendidikan kesetaraan (Badan Pusat Statistik, 2024). Berdasarkan data pelaksanaan program dari tahun 2022 hingga 2024,

tercatat sebanyak 2.908 ATS telah berhasil diintervensi dan kembali bersekolah melalui PKBM (Dunn, 2003). Dari jumlah tersebut, Kecamatan Semampir menjadi wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu sebanyak 2.858 orang (Hidayanti, 2023). Data ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani isu putus sekolah secara sistematis dan terstruktur melalui pendekatan kebijakan berbasis inklusi pendidikan (Hayat, 2018).

Berdasarkan paparan sebelumnya mengenai tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Semampir yang mencatat jumlah ATS tertinggi, penulis tertarik untuk meneliti implementasi Program Outreach Penanganan ATS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan (PUSDATIN Kemendikbud). Penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan program di wilayah Kecamatan Semampir, dan akan diberi judul "Implementasi Program Outreach Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Pendidikan Kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya (Suharto, 2013)."

Langkah awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji proses komunikasi dan sosialisasi program outreach di wilayah Kecamatan Semampir, termasuk di lima kelurahan yang berada di bawah naungannya, yaitu (UNICEF, 2007):

1. Kelurahan Ampel
2. Kelurahan Sidotopo
3. Kelurahan Ujung
4. Kelurahan Pegirian
5. Kelurahan Wonokusumo

Sebagai bagian dari upaya implementasi program, akan dilakukan pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) penanganan ATS yang bertugas di lapangan (Agustino, 2017). Tim ini akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan bekerja sama secara intensif dengan pihak Kecamatan Semampir (Muda and Batubara, 2019). Penelitian ini juga akan menjelaskan secara rinci prosedur implementasi Program Outreach, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi kepada kelurahan-kelurahan, hingga pelaksanaan intervensi pendidikan melalui satuan pendidikan kesetaraan (PKBM) (Robinson and Kett, 2017). Tujuan utamanya adalah agar seluruh perangkat kelurahan dapat memahami alur program dan mampu menyosialisasikan informasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak ATS dan menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di wilayah tersebut (Databoks, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi Program Outreach Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (Wahab, 1990)? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Outreach Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (Hidayati and Anisykurlillah, 2024).

METODE

Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis (Edwards, 2019). Tujuannya adalah menggambarkan secara mendalam kondisi dan implementasi Program Outreach Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial dalam konteks nyata di masyarakat (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam program penanganan anak tidak sekolah di Kecamatan Semampir (R. Indonesia, 2003). Sampel atau sasaran penelitian ditentukan secara purposive dan snowball sampling, berdasarkan kapasitas informan dalam memberikan informasi relevan (Wahab, 2017). Informan terdiri dari:

1. Kepala Bidang PPNF Dinas Pendidikan
2. Kasi Kesra Kecamatan
3. Ketua RW
4. Anak tidak sekolah dan orang tua
5. Kader masyarakat (Kader Surabaya Hebat)

Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Teknik Pengumpulan Data (E. III, 1980):

- Wawancara terstruktur dengan pedoman khusus untuk menggali informasi mendalam dari informan.
- Observasi terstruktur untuk mencatat perilaku dan kondisi nyata anak serta pelaksanaan program.
- Dokumentasi terhadap arsip, foto, dan dokumen program.

Pengembangan Instrumen (Iswahyudi, 2020): Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci, dengan bantuan pedoman wawancara dan observasi sebagai alat bantu sistematis untuk mengarahkan proses pengumpulan data.

- Teknik Analisis Data Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dengan tahapan (Anak Putus Sekolah di Kota Surabaya, 2024):
- Pengumpulan Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Reduksi Data untuk menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.
- Penyajian Data dalam bentuk kategori tematik yang mudah dipahami.
- Penarikan Kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan hingga akhir penelitian untuk menemukan pola dan makna dari fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam implementasi Program Outreach Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (Dunn, 2003). Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2024, tercatat bahwa Kecamatan Semampir memiliki jumlah ATS tertinggi di Kota Surabaya, yakni mencapai 2.858 anak. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan mengimplementasikan program

outreach yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menjangkau, dan mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan program Paket A, B, dan C (Barton and Coley, 2015).

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pendekatan pendidikan kesetaraan yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pendidikan karakter. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi kelompok, permainan edukatif, dan kegiatan belajar yang menyenangkan serta menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Program ini juga berfokus pada pengembangan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kedisiplinan guna mempersiapkan peserta didik untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat (Sanjaya, 2017).

Dalam menganalisis implementasi program outreach, penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa informasi mengenai program telah disosialisasikan melalui berbagai media seperti pamflet, media sosial, dan jalur formal pemerintahan seperti RT/RW. Namun, terdapat kendala seperti penyampaian informasi yang tidak merata, pergantian petugas secara tiba-tiba, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi program, yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan (Wahab, 2017).

Aspek sumber daya menjadi tantangan utama dalam implementasi program. Keterbatasan jumlah petugas di lapangan, belum adanya Surat Keputusan (SK) untuk tim Satuan Tugas ATS, serta minimnya dukungan fasilitas operasional seperti sarana transportasi dan perangkat komunikasi menjadi penghambat dalam menjangkau ATS secara menyeluruh. Selain itu, insentif bagi petugas juga belum sepenuhnya diberikan secara rutin, yang berdampak pada rendahnya motivasi pelaksana program (Islamy, 2001).

Dari sisi disposisi, meskipun terdapat sejumlah petugas yang memiliki dedikasi dan semangat dalam menjalankan program, masih ditemukan pelaksana yang kurang memahami urgensi pendidikan kesetaraan. Rendahnya pemahaman dan sikap positif terhadap program menyebabkan tidak semua petugas menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini diperparah dengan belum adanya pelatihan khusus atau peningkatan kapasitas bagi para pelaksana di lapangan (Rohman, 2009).

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program outreach juga dinilai belum efisien. Koordinasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Pendidikan, kecamatan, kelurahan, dan PKBM, masih berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku menyebabkan tumpang tindih tugas antar instansi serta ketidakefektifan dalam menindaklanjuti kasus ATS di masing-masing wilayah (Iswahyudi, 2020).

Beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi program ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kondisi

sosial ekonomi yang membuat anak harus bekerja, serta keberadaan wilayah-wilayah dengan tingkat aksesibilitas rendah di Kecamatan Semampir. Selain itu, tidak semua orang tua bersedia mendukung anaknya untuk kembali bersekolah, terutama mereka yang sudah lama putus sekolah atau memiliki pengalaman buruk dalam sistem pendidikan formal (H. et al, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun program outreach telah berhasil mengembalikan ribuan anak ke jalur pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperbaiki (Hogwood and Gunn, 1984). Diperlukan perbaikan dalam hal komunikasi program yang lebih konsisten, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, penyediaan insentif dan fasilitas yang memadai, serta penyusunan sistem birokrasi yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada hasil (Nugroho, 2008). Keberhasilan program ini ke depan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kebijakan, keterlibatan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah (Ridwan et al, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Program *Outreach* Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya" dan mengacu pada pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Program *Outreach* Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah di implementasikan. Beberapa hal temuan adalah sebagai berikut ;

1. Implementasi Program *Outreach* Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya adalah upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan anak-anak yang tidak bersekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan. Dengan melalui pemetaan, pemberdayaan keluarga, penyediaan pendidikan alternatif, serta dukungan sosial dan ekonomi, program ini bertujuan mengurangi angka anak tidak sekolah dan memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang layak. Kesuksesan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sehingga menciptakan generasi muda yang terdidik dan siap menghadapi tantangan masa depan.
2. Faktor pendukung dalam implementasi program *Outreach* Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Pendidikan kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya melibatkan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, kemajuan infrastruktur pendidikan, dan partisipasi berbagai lembaga sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, akses yang tidak merata, faktor sosial-ekonomi, stigma sosial, ketidaksesuaian kualitas pendidikan non-formal, dan kurangnya koordinasi antar lembaga, menjadi hambatan besar yang perlu diatasi. Dengan penanganan yang tepat terhadap faktor-faktor penghambat ini, program outreach dapat berjalan lebih

efektif dan dapat memastikan bahwa lebih banyak anak di Surabaya mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah yang lebih terpencil atau kurang terjangkau. Membangun lebih banyak sekolah di kawasan yang padat penduduk atau membangun fasilitas pendidikan non-formal (seperti PKBM) di daerah yang membutuhkan dapat membantu menurunkan angka anak yang tidak bersekolah.
2. Kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya diharapkan bisa memperluas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil. Penggunaan pembelajaran daring yang terjangkau dan pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa akan membantu mengatasi hambatan geografis dan memudahkan akses pendidikan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian jangka panjang mengenai dampak program outreach terhadap anak-anak yang tidak bersekolah. Evaluasi dampak program dalam jangka panjang, baik dalam hal prestasi akademik maupun perkembangan sosial, akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai efektivitas dan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, T. (2016). *Mengenal pendidikan inklusif dan tantangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin tahun 2022–2023*. <https://bps.go.id>
- Barton, P. E., & Coley, R. J. (2015). *The mission of public education*. Princeton: Educational Testing Service.
- Databoks. (2024). *Jumlah anak tidak sekolah di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Terjemahan oleh Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C. III. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fanani, A. (2019). *Strategi pendidikan kesetaraan di Surabaya*. Surabaya: Penerbit Unesa.
- González, T. (2017). *Global education and access challenges*. New York: UNESCO Publishing.

- Hayat, B. (2018). *Pendidikan untuk semua: Peluang dan tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hayes, D. (2018). *Education and human rights: The global perspective*. London: Routledge.
- Hidayanti, R. (2023). *Peran pemerintah dalam penanganan anak tidak sekolah*. Surabaya: LPPM Universitas Negeri Surabaya.
- Hidayati, N., & Anisykurlillah, I. (2024). *Efektivitas program kesetaraan di wilayah perkotaan*. Surabaya: LPPM Universitas Negeri Surabaya.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford: Oxford University Press.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. (2016). *Agenda reformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iswahyudi, A. (2020). *Pendidikan kesetaraan di Surabaya: Kajian kebijakan dan implementasi*. Surabaya: Dispindik Surabaya.
- Kingdon, G. (1984). *Education dropout trends in developing countries*. Washington DC: World Bank.
- McGinnis, A. (2016). *Out-of-school children global report*. New York: UNESCO Institute for Statistics.
- Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Muda, I., & Batubara, M. (2019). *Model implementasi kebijakan pendidikan berbasis masyarakat*. Medan: Penerbit Unimed.
- Nugroho, R. (2008). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Puspitasari, A., Hendrati, R., & Wardaya, Y. (2024). *Potret anak tidak sekolah di Indonesia tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Republic of Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Ridwan, A., Sari, N. P., & Mukhlis, M. (2021). *Evaluasi program pendidikan kesetaraan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Robinson, A., & Kett, M. (2017). *Education equity and policy*. London: DFID Publications.
- Rohman, A. (2009). *Implementasi kebijakan pendidikan non-formal*. Malang: UM Press.
- Sanjaya, W. (2017). *Strategi pembelajaran berbasis karakter*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, E. (2013). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- UNICEF. (2007). *Education is a right*. New York: United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2022). *Out-of-school children global database*. <https://unicef.org>
- Wahab, S. A. (1990). *Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2017). *Teori dan model implementasi kebijakan*. Surabaya: Airlangga University Press.